

PENGARUH PAJAK HIBURAN, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK REKLAME TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Yuda Saputra

Fakultas Ekonomi Universitas Mpu Tantular, Indonesia

Email: yudhaseop44@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to determine the effect of entertainment tax, restaurant tax, and advertisement tax on the financial performance of local government of DKI Jakarta Province. The research period used was 4 years, 2016-2019.

The study population includes the local revenue of DKI Jakarta Province for the period 2016-2019. The sampling technique used nonprobability sampling with a saturated sampling method. The type of data used is secondary data obtained from Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) of DKI Jakarta Province. The data analysis method used is multiple linear regression analysis.

The results showed that entertainment tax has a positive effect, restaurant tax has a negative effect, advertisement tax has no effect, and entertainment tax, restaurant tax, and advertisement tax together have a positive effect on the financial performance of the regional government of DKI Jakarta Province.

Keywords: *Entertainment Tax, Restaurant Tax, Advertisement Tax*

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan nasional. Namun dalam upaya pelaksanaannya, Indonesia masih mengalami beberapa masalah, salah satunya yaitu masalah perekonomian. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sistem pemerintahan daerah di Indonesia menjalankan pemerintahannya dengan prinsip otonomi daerah.

Kebijakan otonomi daerah memberikan implikasi adanya pembagian kewenangan urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disertai dengan pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang telah diserahkan kepada daerah. Untuk pembiayaan belanja daerah, Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang berasal dari PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bertujuan agar pemerintah daerah mendapatkan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerahnya sesuai dengan potensi daerah tersebut sebagai perwujudan desentralisasi.

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas, serta meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta mengupayakan untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensial sehingga dapat dipungut pajak. Pajak dapat dipergunakan untuk

membiayai kegiatan pemerintah maupun untuk meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.

Semua itu dapat dipenuhi jika pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerah yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangan secara optimal. Keberhasilan potensi daerah tersebut dapat dinilai dari kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut (Patriati, 2010). Pengukuran kinerja keuangan daerah dapat digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Waskito, 2014).

Patriati (2010) menyatakan bahwa pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. *Pertama*, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. *Kedua*, untuk mengalokasi sumber daya dan pembuatan keputusan. *Ketiga*, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Inti dari pengukuran kinerja organisasi pemerintah adalah *value for money*. *Value for money* merupakan konsep pendekatan pengukuran kinerja biasanya dinyatakan dengan tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Jakarta sebagai ibu kota tentunya mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat dari segi perekonomiannya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya bangunan, gedung, dan tempat usaha seperti hotel, restoran, tempat hiburan, dan pusat perbelanjaan yang berdiri. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Apakah pajak hiburan, pajak restoran dan pajak reklame berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah? Sedangkan tujuan penelitian untuk membuktikan secara empiris pengaruh pajak hiburan, restoran dan reklame terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

LANDASAN TEORI

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, yang timbal baliknya tidak dapat dirasakan secara langsung, dan digunakan untuk pembiayaan pemerintahan. Adapun kontraprestasi atau timbal balik yang dapat dirasakan oleh rakyat atas pajak antara lain seperti jalan raya, jembatan, dan lain-lain.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD (Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005). Menurut Tama (2017), kinerja adalah gambaran

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud sebagai kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kinerja keuangan pemerintah daerah, yang meliputi anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi (Patriati, 2010). Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain sebagai berikut :

1. Rasio kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan semakin tinggi pula kemandirian keuangan daerahnya.

Tabel 1. Tingkat Kemandirian Kinerja Keuangan

Kriteria	Persentase Kinerja Keuangan
Rendah sekali	0 % - 25 %
Rendah	25 % - 50 %
Sedang	50 % - 75 %
Tinggi	75 % - 100 %

Sumber : Haryanto (2014)

Formula yang digunakan untuk mengukur rasio ini menurut Patriati, 2010 adalah :

$$RKM = \frac{PAD}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}} \times 100 \%$$

2. Rasio efektivitas

Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik (Haryanto, 2014). Nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 2. Tingkat Efektivitas Kinerja Keuangan

Kriteria	Persentase Kinerja Keuangan
Sangat Efektif	Lebih dari 100 %
Efektif	90 % - 100 %
Cukup efektif	80 % - 90 %
Kurang efektif	60 % - 80 %
Tidak efektif	Kurang dari 60 %

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri RI

Formula yang digunakan untuk mengukur rasio ini menurut Patriati, 2010 adalah :

$$REK = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \times 100 \%$$

3. Rasio efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Indikator rasio efektivitas PAD saja tidak cukup untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mobilisasi penerimaan PAD. Meskipun bila dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik akan tetapi biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan asli daerah. Secara umum, nilai efisiensi PAD dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 3. Tingkat Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria	Persentase Kinerja Keuangan
Tidak Efisien	Lebih dari 100 %
Kurang Efisien	90 % - 100 %
Cukup Efisien	80 % - 90 %
Efisien	60 % - 80 %
Sangat Efisien	Kurang dari 60 %

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri

Formula yang digunakan untuk mengukur rasio ini menurut Patriati, 2010 adalah :

$$RES = \frac{\text{Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Artinya bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut berdasarkan peraturan daerahnya. Wewenang atas pemungutan pajak pun dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan di daerahnya tersebut.

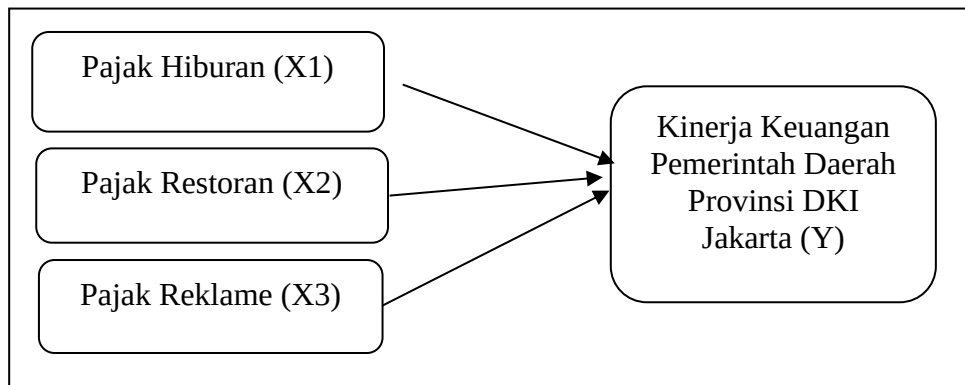
Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 , pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, jenis pajak yang dapat

dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Kerangka Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mwnguji ada atau tidaknya pengaruh pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta yang dinyatakan dengan rasio efektivitas. Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai erikut :



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, karena data penelitian berupa angka-angka dan menggunakan analisis statisitik. Menurut Sugiyono (2014:36) penelitian asosiatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini memiliki tingkat yang tertinggi bila dibandingkan dengan penelitian yang lain, seperti penelitian deskriptif dan penelitian komparatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapt berfungsi untuk menjelaskan, memperkirakan, dan mengontrol suatu gejala.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014 : 80). Populasi dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta selama 4 tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin untuk mempelajari semua yang ada pada populasi karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut (Sugiyono, 2014 : 81).

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling* dengan teknik *sampling* jenuh. *Non probability sampling* adalah teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi dijadikan sebagai sampel. *Sampling* jenuh adalah teknik penentuan sampel dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2014 : 85).

Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan empat variabel penelitian. Satu variabel yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah, menjadi variabel dependen. Tiga variabel yaitu pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak reklame, menjadi variabel independen. Variabel-variabel tersebut selanjutnya akan diuji secara sistematis.

Tabel 4. Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran	Skala Pengukuran
1	Pajak Hiburan (X ₁)	Pajak atas penyelenggaraan hiburan (UU Nomor 28 Tahun 2009)	Tarif Pajak × Dasar Pengenaan Pajak (jumlah uang yang diterima oleh penyelenggara hiburan)	Nominal
2	Pajak Restoran (X ₂)	Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain (UU Nomor 28 Tahun 2009)	Tarif Pajak × Dasar Pengenaan Pajak (jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran)	Nominal
3	Pajak Reklame (X ₃)	Pajak atas penyelenggaraan reklame (UU Nomor 28 Tahun 2009)	Tarif Pajak × Dasar Pengenaan Pajak (nilai sewa reklame (NSR))	Nominal
4	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Y)	Tingkat pencapaian dari suatu kinerja keuangan pemerintah daerah, yang meliputi anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah	$REK = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$	Rasio

Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan Program SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta perbulan selama 4 tahun yaitu Januari 2016 sampai dengan Desember 2019. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta

Berikut ini adalah target pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta selama empat tahun yaitu tehitung mulai Januari 2016 sampai dengan Desember 2019.

Tabel 5. Target Pendapatan Asli Daerah

Bulan	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Januari	3,208,482,069,978	3,473,948,985,545	3,695,839,821,570	4,237,090,157,622
Februari	3,208,482,069,978	3,473,948,985,545	3,695,839,821,570	4,237,090,157,622
Maret	3,208,482,069,978	3,473,948,985,545	3,695,839,821,570	4,237,090,157,622
April	3,208,482,069,978	3,473,948,985,545	3,695,839,821,570	4,237,090,157,622
Mei	3,208,482,069,978	3,473,948,985,545	3,695,839,821,570	4,237,090,157,622
Juni	3,208,482,069,978	3,473,948,985,545	3,695,839,821,570	4,237,090,157,622
Juli	3,208,482,069,978	3,473,948,985,545	3,695,839,821,570	4,237,090,157,622
Agustus	3,208,482,069,978	3,473,948,985,545	3,695,839,821,570	4,237,090,157,622
September	3,208,482,069,978	3,473,948,985,545	3,695,839,821,570	4,237,090,157,622
Oktober	3,208,482,069,978	3,473,948,985,545	3,695,839,821,570	4,237,090,157,622
November	3,208,482,069,978	3,473,948,985,545	3,695,839,821,570	4,237,090,157,622
Desember	3,208,482,069,978	3,473,948,985,545	3,695,839,821,570	4,237,090,157,622

Sumber: Laporan realisasi pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta

Berikut ini adalah realisasi pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta selama empat tahun yaitu tehitung mulai Januari 2016 sampai dengan Desember 2019.

Tabel 6. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Bulan	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Januari	3,008,103,824,112	3,892,808,852,381	4,133,625,484,593	3,229,444,743,614
Februari	2,897,674,432,447	3,763,291,366,244	3,314,216,433,886	3,159,246,867,318
Maret	2,420,312,921,273	3,176,170,512,896	3,591,496,545,752	2,996,079,846,691
April	2,917,847,533,325	2,775,619,425,292	3,486,352,345,489	3,711,032,161,223
Mei	2,512,787,713,926	4,702,392,646,449	2,644,144,969,366	3,578,990,586,893
Juni	3,157,892,974,616	1,576,901,775,666	2,561,919,714,045	3,208,206,435,677
Juli	2,838,932,033,279	4,852,719,642,193	3,538,616,196,742	4,225,371,360,075
Agustus	2,965,509,087,841	3,891,260,683,219	4,145,822,997,694	4,367,519,940,760
September	2,977,837,527,597	3,447,029,012,058	3,706,755,246,415	3,502,856,538,094
Oktober	3,308,140,670,645	3,904,960,723,714	3,567,746,050,605	2,573,067,531,663
November	3,038,001,786,273	4,076,002,258,497	3,528,760,324,570	4,982,471,918,947

Desember	4,844,977,082,383	3,842,331,909,134	5,107,680,293,655	6,173,112,072,848
----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Pendapatan Pajak Hiburan Provinsi DKI Jakarta

Berikut ini adalah pendapatan pajak hiburan yang ada di Provinsi DKI Jakarta selama empat tahun yaitu tehitung mulai Januari 2016 sampai dengan Desember 2019.

Tabel 7. Pendapatan Pajak Hiburan

Bulan	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Januari	62,753,646,505	66,950,829,234	79,567,310,951	60,692,925,077
Februari	60,449,920,499	64,723,310,898	63,794,673,837	59,373,653,566
Maret	50,491,429,277	54,625,659,181	69,131,981,961	56,307,156,213
April	60,870,762,237	47,736,744,651	67,108,082,770	69,743,691,192
Mei	52,420,594,887	80,874,530,192	50,896,605,356	67,262,153,338
Juni	65,878,477,279	27,120,489,473	49,313,868,244	60,293,780,600
Juli	59,224,464,209	83,459,942,783	68,114,098,946	79,409,981,510
Agustus	61,865,055,160	66,924,202,905	79,802,098,384	82,081,466,500
September	62,122,245,269	59,284,043,862	71,350,573,101	65,831,319,716
Oktober	69,012,874,014	67,159,824,305	68,674,813,541	48,357,227,733
November	63,377,363,723	70,101,497,791	67,924,385,280	93,638,634,156
Desember	101,073,632,072	66,082,696,907	98,316,692,617	116,015,060,877

Sumber: Laporan penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta

Pendapatan Pajak Restoran Provinsi DKI Jakarta

Berikut ini adalah pendapatan pajak restoran yang ada di Provinsi DKI Jakarta selama empat tahun yaitu tehitung mulai Januari 2016 sampai dengan Desember 2019.

Tabel 8. Pendapatan Pajak Restoran

Bulan	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Januari	165,173,381,487	230,070,498,671	259,285,491,799	297,480,135,174
Februari	217,280,373,826	221,665,843,827	236,976,415,859	267,267,755,933
Maret	183,601,617,551	190,910,459,297	233,746,751,445	261,244,961,865
April	189,602,638,346	132,566,375,458	262,948,490,233	290,631,421,530
Mei	167,524,289,109	310,191,680,118	155,263,325,489	281,769,648,891
Juni	207,359,606,025	94,927,819,396	203,118,745,742	298,153,883,824
Juli	196,292,117,956	374,858,837,061	315,200,636,452	314,337,069,162
Agustus	253,451,217,130	240,248,515,344	249,809,029,179	314,482,063,935
September	212,659,090,714	232,808,241,697	381,234,943,997	307,819,010,898
Oktober	199,203,527,333	213,663,102,579	275,112,034,363	246,246,968,251
November	220,428,747,152	228,432,785,558	263,833,510,922	373,597,414,432
Desember	240,863,472,560	281,615,634,418	319,931,457,704	356,023,351,232

Sumber: Laporan penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta

Pendapatan Pajak Reklame Provinsi DKI Jakarta

Berikut ini adalah pendapatan pajak reklame yang ada di Provinsi DKI Jakarta selama empat tahun yaitu dihitung mulai Januari 2016 sampai dengan Desember 2019.

Tabel 9. Pendapatan Pajak Reklame

Bulan	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Januari	50,074,864,511	65,063,971,191	78,489,509,327	81,671,289,979
Februari	67,736,280,259	56,308,205,933	71,062,214,994	70,090,357,416
Maret	57,429,968,428	78,803,127,540	85,997,828,076	81,473,940,520
April	59,296,432,516	76,326,659,860	82,931,387,914	97,517,462,703
Mei	60,329,370,803	95,781,158,865	36,948,697,880	91,897,243,198
Juni	74,835,177,451	52,759,690,494	65,549,900,827	61,435,329,163
Juli	55,437,874,328	84,135,611,480	126,837,551,328	90,373,798,242
Agustus	73,503,809,462	78,939,598,805	72,034,566,638	91,314,669,449
September	87,691,999,245	82,680,626,058	110,615,637,165	92,675,977,526
Oktober	86,432,549,859	88,284,265,597	106,858,324,586	91,250,981,287
November	96,934,465,656	96,639,550,910	78,687,365,119	105,725,107,688
Desember	124,568,539,073	109,031,344,281	98,781,795,023	123,049,597,474

Sumber: Laporan penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta

Kinerja Keuangan (Rasio Efektivitas)

Dalam penelitian ini, kinerja keuangan pemerintah daerah diukur menggunakan rasio efektivitas. Rasio efektivitas dihitung dari realisasi pendapatan asli daerah dibagi target pendapatan asli daerah, dikali 100%. Berikut ini adalah hasil perhitungan tersebut :

Tabel 10. Rasio Efektivitas

Bulan	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Januari	0.94	1.12	1.12	0.76
Februari	0.90	1.08	0.90	0.75
Maret	0.75	0.91	0.97	0.71
April	0.91	0.80	0.94	0.88
Mei	0.78	1.35	0.72	0.84
Juni	0.98	0.45	0.69	0.76
Juli	0.88	1.40	0.96	1.00
Agustus	0.92	1.12	1.12	1.03
September	0.93	0.99	1.00	0.83
Oktober	1.03	1.12	0.97	0.61
November	0.95	1.17	0.95	1.18
Desember	1.51	1.11	1.38	1.46

Sumber: Data yang diolah dari laporan realisasi pendapatan daerah

Pajak Hiburan

Besarnya pajak hiburan dapat dihitung dari tarif pajak dikalikan dasar pengenaan pajak atau jumlah yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Hasil perhitungan pajak hiburan adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Perhitungan Pajak Hiburan

Bulan	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Januari	24.86	24.93	25.10	24.83
Februari	24.83	24.89	24.88	24.81
Maret	24.65	24.72	24.96	24.75
April	24.83	24.59	24.93	24.97
Mei	24.68	25.12	24.65	24.93
Juni	24.91	24.02	24.62	24.82
Juli	24.80	25.15	24.94	25.10
Agustus	24.85	24.93	25.10	25.13
September	24.85	24.81	24.99	24.91
Oktober	24.96	24.93	24.95	24.60
November	24.87	24.97	24.94	25.26
Desember	25.34	24.91	25.31	25.48

Sumber: Data yang diolah dari laporan penerimaan pajak daerah

Pajak Restoran

Besarnya pajak restoran dapat dihitung dari tarif pajak dikalikan dasar pengenaan pajak atau jumlah yang seharusnya diterima oleh restoran. Hasil perhitungan pajak restoran adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Perhitungan Pajak Restoran

Bulan	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Januari	25.83	26.16	26.28	26.42
Februari	26.10	26.12	26.19	26.31
Maret	25.94	25.98	26.18	26.29
April	25.97	25.61	26.30	26.40
Mei	25.84	26.46	25.77	26.36
Juni	26.06	25.28	26.04	26.42
Juli	26.00	26.65	26.48	26.47
Agustus	26.26	26.20	26.24	26.47
September	26.08	26.17	26.67	26.45
Oktober	26.02	26.09	26.34	26.23
November	26.12	26.15	26.30	26.65
Desember	26.21	26.36	26.49	26.60

Sumber: Data yang diolah dari laporan penerimaan pajak daerah

Pajak Reklame

Besarnya pajak reklame dapat dihitung dari tarif pajak dikalikan dasar pengenaan pajak atau nilai sewa reklame. Hasil perhitungan pajak reklame adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Perhitungan Pajak Reklame

Bulan	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Januari	24.64	24.90	25.09	25.13
Februari	24.94	24.75	24.99	24.97
Maret	24.77	25.09	25.18	25.12
April	24.81	25.06	25.14	25.30
Mei	24.82	25.29	24.33	25.24
Juni	25.04	24.69	24.91	24.84
Juli	24.74	25.16	25.57	25.23
Agustus	25.02	25.09	25.00	25.24
September	25.20	25.14	25.43	25.25
Oktober	25.18	25.20	25.39	25.24
November	25.30	25.29	25.09	25.38
Desember	25.55	25.41	25.32	25.54

Sumber: Data yang diolah dari laporan penerimaan pajak daerah

Analisis Data

Tabel 14. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-19.257	1.580		-12.188	.000		
LN_Pajak_Hiburan	1.050	.093	1.112	11.253	.000	.404	2.475
LN_Pajak_Restoran	-.335	.084	-.421	-3.980	.000	.353	2.836
LN_Pajak_Reklame	.114	.074	.134	1.545	.129	.524	1.909

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: Ouput SPSS

Berdasarkan tabel 4.17 diatas, maka persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -19.257 + 1.050LN_Pajak_Hiburan - 0.335LN_Pajak_Restoran + 0.114LN_Pajak_Reklame + e$$

Dari persamaan tersebut, dapat dijelaskan:

1. Nilai konstanta sebesar -19.257, jika pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak reklame bernilai 0, maka kinerja keuangan pemerintah sebesar -19.257.
2. Koefisien regresi pajak hiburan sebesar 1.050 menyatakan bahwa jika pajak hiburan mengalami kenaikan satu satuan, maka kinerja keuangan pemerintah akan mengalami peningkatan sebesar 1.050 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
3. Koefisien regresi pajak restoran sebesar -0.335 menyatakan bahwa jika pajak restoran mengalami kenaikan satu satuan, maka kinerja keuangan pemerintah akan mengalami penurunan sebesar 0.335 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
4. Koefisien regresi pajak reklame sebesar 0.114 menyatakan bahwa jika pajak reklame mengalami kenaikan satu satuan, maka kinerja keuangan pemerintah akan mengalami peningkatan sebesar 0.114 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan penerimaan pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak reklame di Provinsi DKI Jakarta selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2019 mengalami fluktuatif (naik turun). Berdasarkan hasil pengujian statistik dan hipotesis serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai signifikansi pajak hiburan pada uji t atau uji parsial lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan ($0.000 < 0.1$). Nilai t hitung pajak hiburan juga lebih besar dari nilai t tabel ($11.253 > 1.6794$) sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak hiburan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Nilai signifikansi pajak restoran pada uji t atau uji parsial lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan ($0.000 < 0.1$). Nilai t hitung pajak restoran juga lebih kecil dari nilai t tabel ($-3.980 < 1.6794$) sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak restoran memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Nilai signifikansi pajak reklame pada uji t atau uji parsial lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan ($0.129 > 0.1$). Nilai t hitung pajak reklame juga lebih kecil dari nilai t tabel ($1.545 < 1.6794$) sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak reklame tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Nilai signifikansi pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak reklame pada uji F atau uji serentak lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan ($0.000 < 0.1$). Nilai F hitung pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak reklame juga lebih besar dari nilai F tabel ($69.802 > 2.21$) sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak reklame secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, hasil penelitian ini memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta
Sebaiknya Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta lebih mengoptimalkan pemungutan pajak daerah, mengingat bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki banyak potensi dan aset daerah. Hal

ini diharapkan agar pendapatan pajak daerah dapat terus meningkat sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah pun dapat terus meningkat.

2. Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti yang berminat untuk mendalami tentang pengaruh pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, diharapkan agar menambah objek dan variabel penelitian seperti pajak hotel, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan dan sebagainya sehingga menjadi lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, Irham. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan*. Cetakan Ketiga. Bandung : Alfabeta.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Cetakan VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haryanto, Andri. *Analisis Efektivitas, Kemandirian dan Desentralisasi Pemerintah Kota Medan*. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014.
- Istanti, Sri Layla Wahyu, 2016. *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pati*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis STIE YPPI Rembang, ISSN : 2502-3497
- Kemendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Lasmini dan Wuku Astuti, 2019. *Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2015-2016*. E-Jurnal Universitas Widya Mataram, Vol.10 No.1(Juni 2019), ISSN : 2442-4439
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Novita, Nita Eka. 2017. *Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2016)*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Tangerang.
- Patriati, Ratri, 2010. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Jawa Tengah*. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pajak Hiburan.
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi*. Jakarta : Universitas Mpu Tantular. 2018
- Sinambela, Lijan Poltak. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-21. Bandung : Alfabeta.
- Tama, Annafi Indra, 2017. *Perspektif Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah*. JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi Universitas Islam 45 Bekasi.
- Undang - undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Waskito. *Pengaruh Ukuran Anggota Legislatif, Kekayaan Daerah, dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten*. Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Tangerang. 2014.